

HARIAN MERDEKA

aspirasi rakyat

Soal Kopdes, Pemerintah Bentuk Satgas Lintas Kementerian

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Pemerintah mengambil langkah strategis untuk memastikan keberlangsungan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) lintas kementerian dan lembaga

Bersambung ke
Halaman 11

Sayembara Ijazah Gibran Berakhir, Denny Indrayana Bidik MK: Bukan Pemakzulan!

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Polemik mengenai ijazah pendidikan SLTA atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Setelah sayembara yang digagas mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana berakhir, kini muncul babak baru.

Denny mengungkapkan adanya langkah hukum yang tengah diarahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menariknya, Denny menegaskan jalur yang dipilih bukan pemakzulan.

Bersambung ke
Halaman 11

KPK USUT ALIRAN DANA TAMBANG BATU BARA KE POLITIKUS PSI

JAKARTA |
Harian Merdeka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menerima aliran uang terkait kasus gratifikasi dari per metrik ton tambang batu

bara yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dugaan ini muncul setelah pemeriksaan Ahmad Ali beberapa waktu lalu. Katanya, diduga ada jasa pengamanan yang diberikan terhadap perusahaan tambang batu bara yang sudah

ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam perkara ini.

Adapun ketiga perusahaan tambang batu bara yang sudah jadi tersangka korupsi korporasi adalah PT Alamjaya

Bersambung ke
Halaman 11



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Forum Pimred Multimedia Indonesia (FPRMI) menggelar Ngobrol Santai (Ngobras) bersama Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Hotel Luminor, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).

Kegiatan yang mengangkat tema "Bicara Polisi, Publik dan Media" tersebut menjadi ruang dialog antara kepolisian, pimpinan media, dan insan pers untuk membahas berbagai isu terkait tugas kepolisian, persepsi publik, serta hubungan Polri dengan media.

Ketua Umum Forum Pimred Multimedia Indonesia, Bernadus Wilson Lumi mengatakan, Ngobras merupakan salah satu program forum yang dirancang untuk membuka ruang komunikasi antara lembaga negara, media, dan publik.

Menurut Wilson, forum tersebut dapat menjadi sarana bagi lembaga negara maupun tokoh nasional untuk menjelaskan tugas dan fungsi, menjawab berbagai pandangan masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan dengan media.

"Ngobras merupakan ruang kolaborasi untuk sama-sama menjaga hubungan dengan media, transparansi publik, serta sosialisasi kinerja lembaga," kata Wilson.

Sementara itu, Sekjen Forum Pimred Multimedia Indonesia, Helmy Halim mengatakan, Ngobras direncanakan digelar secara rutin

Ngobras Bersama Kadiv Humas Polri, Isir: Percayalah, Masih Banyak Polisi Baik



setiap bulan dengan menghadirkan tokoh-tokoh nasional.

Program tersebut diharapkan dapat menciptakan ruang komunikasi yang lebih terbuka antara lembaga negara, media, dan masyarakat.

"Rencananya Ngobras Forum Pimred setiap bulan diadakan, dengan mengundang tokoh-tokoh nasional. Obrolannya juga santai dan mengalir saja, tidak ada pertanyaan media yang berat-berat," ujar Helmy.

Isir Jelaskan Perkembangan Tugas Polri

Dalam dialog tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa perkembangan tugas kepolisian tidak terlepas dari perubahan regulasi yang menjadi dasar hukum

pelaksanaan tugas Polri.

Ia menyebut ketentuan mengenai tugas dan fungsi kepolisian telah diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, termasuk penjelasannya.

"Tupoksi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan dijelaskan dalam penjelasannya. Tidak ada yang melanggar," kata Isir.

Menurut dia, penugasan anggota Polri pada kementerian maupun instansi lainnya tetap harus mengacu pada tugas dan fungsi kepolisian serta kebutuhan atau permintaan dari instansi terkait. ● (Egi)

Redaksi **MERDEKA**

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS

Pemimpin Umum : Helmy Halim, Pemimpin Perusahaan : Alan Oskar, Wakil Pemimpin Perusahaan : Verencia Mercy, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Helmy Halim, Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Rohman, Redaktur Eksekutif : Egi Hendrawan, Redaktur Pelaksana : Agus Irawan, Redaktur : Andri Achdiat, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, Reporter : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi.ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA, Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar, Ian Zarian, Juli Rabiati, H. Mulyadi, Didi, Daenk, Ali.R., Kabiromo Medan : Umar, S.Pd.I Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, Sekretaris Redaksi : Syafina Azzahra, Keuangan : Yosefin Arwinda Devi, Manager Iklan : Muksin, P.Adi, Iklan : S Fajar, Wilki Irawan, Pemasaran : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, Layout : Bobby Saputra, Fuad, IT Web : Walid, Amel, Bagian Umum/OB : Wawan, Penasehat Hukum : Hanafi Tanawijaya. SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp: 081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

Mendagri : IMT-GT Tak Sekadar Forum, Harus Hasilkan Proyek Nyata



MEDAN | **Harian Merdeka**

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) tidak berhenti sebagai forum pertemuan dan dialog antarpemerintah.

Tito menegaskan, kerja sama kawasan tersebut harus mampu melahirkan program dan proyek konkret, terukur, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Pesan itu disampaikan Tito saat memberikan sambutan pada Gala Dinner Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32 di Hotel JW Marriott, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (9/9/2026).

Menurut Tito, tantangan utama IMT-GT bukan hanya menjaga keberlangsungan forum pertemuan antarpemerintah, tetapi bagaimana berbagai gagasan yang muncul dapat benar-benar diwujudkan menjadi kerja sama nyata.

"Pertanyaannya adalah bagaimana kita mewujudkan? Bagaimana kita mengubah visi menjadi kenyataan? Inilah persoalan yang sebenarnya," tegas Tito.

Ia mengatakan pemerintah

pusat maupun daerah memiliki peran strategis untuk menerjemahkan kerja sama regional tersebut ke dalam berbagai bentuk kolaborasi.

Salah satunya melalui penguatan hubungan antardaerah, termasuk membangun kerja sama kota kembar atau provinsi kembar dengan wilayah di Malaysia dan Thailand.

Sumatera Punya Modal Ekonomi Besar

Tito juga menyoroti besarnya potensi ekonomi yang dimiliki kawasan IMT-GT, khususnya hubungan antara Malaysia, Thailand, dan Pulau Sumatera.

Menurutnya, kawasan tersebut memiliki modal yang kuat berupa jumlah penduduk, sumber daya alam, tenaga kerja produktif, serta beragam komoditas unggulan.

Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah komoditas karet. Malaysia dan Thailand dikenal memiliki sejarah panjang sebagai negara penghasil karet, sementara sejumlah wilayah di Sumatera juga memiliki tradisi produksi komoditas tersebut.

Namun, Tito mendorong agar kerja sama tidak berhenti pada perdagangan bahan mentah. Potensi karet

perlu dikembangkan menjadi produk bernilai tambah sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Selain karet, Sumatera juga memiliki kekayaan sumber daya alam lainnya, mulai dari minyak dan gas bumi, emas, hingga sektor pertanian dan perkebunan.

Dengan jumlah penduduk sekitar 63 juta jiwa dan didominasi usia produktif, Sumatera dinilai memiliki basis pasar sekaligus sumber daya manusia yang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.

Posisi geografis Sumatera yang berdekatan dengan Malaysia dan Thailand semakin memperkuat peluang tersebut.

Kondisi ini, kata Tito, dapat menjadi fondasi untuk memperluas perdagangan, investasi, konektivitas, pariwisata, serta berbagai bentuk kerja sama ekonomi lintas negara.

Dorong Kepala Daerah Aktif Bangun Kolaborasi

Tito juga meminta pemerintah daerah tidak hanya menjadi peserta dalam forum IMT-GT, tetapi aktif membangun komunikasi dan kolaborasi dengan daerah di Malaysia dan Thailand.

● (Agus)

10 Produk UMKM Lokal Tembus AEON, Siap Naik Kelas ke Pasar Nasional

TANGERANG | **Harian Merdeka**

Kabar menggembirakan datang dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebanyak 10 produk pangan UMKM binaan Kementerian Perdagangan (Kemendag) berhasil menembus jaringan ritel modern AEON Indonesia.

Produk-produk tersebut akan dipasarkan di 19 gerai AEON Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah Tanah Air. Keberhasilan ini dinilai menjadi bukti bahwa produk UMKM lokal mampu memenuhi standar dan bersaing di pasar ritel modern.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pembukaan akses pasar tersebut merupakan hasil sinergi Kemendag bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) melalui AEON Indonesia. Menurutnya, kolaborasi dengan ritel modern menjadi salah satu strategi untuk memperluas pasar bagi produk UMKM berkualitas.

"Sinergi Kemendag dengan ritel modern menjadi upaya menjawab tantangan pembukaan pasar yang lebih luas bagi UMKM kita yang berkualitas," ujar Budi Santoso setelah menghadiri Launching Akses Pasar UMKM Pangan Kemasan ke AEON Indonesia di AEON Mall BSD City, Kabupaten Tangerang, Rabu (9/9/2026). ●





Pimpinan DPR RI Tampung Aspirasi Kepala Desa AMJ Terkait Pilkades

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Pimpinan DPR RI menampung aspirasi Koordinator Nasional Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) terkait kepastian kebijakan bagi kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada 2027.

“Kami menerima aspirasi dan akan mencoba melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad seusai menerima audiensi Kepala Desa AMJ di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Dasco mengatakan para kepala desa juga menyampaikan masukan mengenai hak kepala desa, penghargaan atas pengabdian, serta keberlanjutan program dan pelayanan pemerintahan di tingkat desa.

Menurut dia, salah satu aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), terutama di tengah kondisi ekonomi dan dinamika yang terjadi di masyarakat desa.

“Mereka menyampaikan aspirasi terkait kondisi saat ini, di mana ada inflasi kemudian dampak global, yang berpengaruh juga pada pelaksanaan Pilkades yang dirasakan mungkin akan membebani situasi keuangan pada saat ini, dan juga dinamika yang terjadi di pedesaan,” ujarnya.

Dasco mengatakan DPR RI akan meneruskan aspirasi tersebut kepada kementerian dan lembaga terkait agar tahapan Pilkades dapat dijalankan pada waktu yang tepat setelah melalui koordinasi.

Seluruh masukan tersebut, kata dia, akan menjadi bahan pembahasan sesuai dengan kewenangan DPR RI sekaligus bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Kepala Desa AMJ Indonesia Saifuddin menilai pelaksanaan Pilkades perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu stabilitas keamanan.

● (Egi)

Tuntut Pemulihan Total, Waka Komisi IX DPR Minta BGN Beri Kompensasi Korban MBG

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh kebutuhan medis korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) ditanggung hingga benar-benar pulih. Charles menegaskan tanggung jawab pemerintah tidak boleh berhenti pada pembayaran biaya rumah sakit.

Pemerintah, katanya, juga harus menjamin pemeriksaan lanjutan, pengobatan, rehabilitasi, hingga pendampingan psikologis jika diperlukan.

“Yang paling penting sekarang, pemerintah dan BGN harus memastikan seluruh kebutuhan medis korban ditanggung sampai benar-benar pulih. Bukan hanya biaya perawatan saat keracunan terjadi, tetapi juga pemeriksaan lanjutan, pengobatan, rehabilitasi, serta pendampingan psikologis apabila dibutuhkan,” kata Charles kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).

Selain menjamin biaya medis, Ketua DPP PDIP ini mendorong BGN segera membuat mekanisme kompensasi yang jelas bagi korban keracunan MBG.

Menurutnya, korban yang mengalami dampak serius akibat keracunan tidak cukup hanya mendapatkan

pengobatan. Terlebih jika kejadian tersebut membuat anak kehilangan waktu sekolah, mengalami trauma, atau menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang.

“Saya kembali mendorong BGN segera membuat mekanisme kompensasi yang jelas bagi korban keracunan MBG,” ujarnya.

Charles menilai kompensasi harus menjadi bagian dari sistem pertanggungjawaban program MBG. Dengan demikian, korban dan keluarga memiliki kepastian mengenai hak yang dapat diperoleh ketika terjadi insiden keracunan.

“Kalau seorang anak sampai mengalami gangguan kesehatan serius, kehilangan waktu sekolah, trauma, bahkan berpotensi mengalami dampak jangka panjang, tanggung jawab negara tidak boleh berhenti pada pembayaran biaya rumah sakit,” tegasnya.

“Korban dan keluarganya berhak mendapatkan pemulihan dan kompensasi yang layak. Ini harus menjadi bagian dari sistem pertanggungjawaban program MBG ke depan,” sambung Charles.

Charles juga menyinggung kasus keracunan MBG di Karo, Sumatera Utara. Menurutnya, kasus tersebut menjadi pengingat bahwa aspek keamanan pangan dalam

program MBG tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.

“Dan kasus Karo sekali lagi menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan dalam MBG tidak bisa dianggap sebagai kejadian biasa,” katanya.

Dia meminta evaluasi dan perbaikan sistem dilakukan secara menyeluruh agar kasus keracunan MBG tidak terus berulang.

“Evaluasi dan perbaikan sistem harus dilakukan secara menyeluruh agar kasus serupa tidak terus berulang,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang siswi yang mengalami keracunan akibat Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, Febiona Purba (16), diduga mengalami gangguan ingatan usai menjalani perawatan di rumah sakit.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumut Wilayah IV Zulkarnain Barus menyebut sudah mendapatkan informasi terkait kondisi Febiona dari kepala sekolah.

“Ya, saya baru konfirmasi kepada kepala sekolah kita. Laporan kepala sekolah kemarin dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk dilakukan EEG,” ujar Zulkarnain saat dikonfirmasi, Selasa (8/9). ● (Egi)



Kejar Calon Tersangka Kasus Nikel Ilegal, Kejagung Periksa Petinggi PT CNI dan Pejabat BUMN



JAKARTA | **Harian Merdekaa**

Setelah bongkar dugaan korupsi yang dilakukan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) terkait ekspor nikel ilegal periode 2017-2020. Kejaksaan Agung kebut periksa saksi-saksi, terutama dari PT CNI dan dilanjutkan dari BUMN guna memperkuat pembuktian sekaligus bidik calon tersangkanya.

Adapun pemeriksaan saksi-saksi

dari PT CNI yaitu sebanyak empat orang dilakukan melalui Tim penyidik pidana khusus Senin kemarin. Sedangkan untuk saksi-saksi dari BUMN juga sebanyak empat orang diperiksa pada hari Selasa ini.

Namun belum diketahui apa yang hendak dikorek atau dialami Tim penyidik terhadap para saksi-saksi dalam kasus yang disidik sejak terbitnya surat per-

intah penyidikan pada 10 April 2025 atau satu tahun lima tahun bulan ini.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Anang Supriatna hanya menyebutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam kasus tersebut.

"Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," ujarnya.

Sementara para saksi yang diperiksa pada hari Senin dari PT CNI yakni saksi DS selaku pemegang saham dan mantan Direksi PT CNI tahun 2017, saksi DR selaku Direksi PT CNI tahun 2024 hingga kini, saksi ASS dan saksi S selaku staf pada PT CNI.

Sedangkan empat saksi dari

BUMN yang diperiksa pada hari Selasa ini tiga diantaranya adalah karyawan yaitu DS, H dan A. Sedangkan DA salah satu Direktur di BUMN.

Dalam kasus ekspor nikel ilegal ini Kejagung melalui Tim penyidik juga sudah menyita uang sebesar Rp401 miliar yang diduga sebagai kerugian keuangan negara setelah menerima dari PT CNI pada 28 Agustus 2026 dan telah dititipkan di Bank Mandiri pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) atas nama JAM Pidsus.

Sedangkan modusnya seperti pernah disampaikan Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Saiful Bahri Siregar yaitu PT CNI yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sudah melakukan kegiatan ekspor sebelum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). ● (Egi)

BAP Tan Kian Ungkap Dugaan Aliran Rp40 Miliar, Aktivis Desak Aparat Buka Jalur Uang

JAKARTA |
Harian Merdeka

Dugaan aliran uang sekitar Rp40 miliar yang dikaitkan dengan penanganan perkara korupsi PT ASABRI dan Jiwasraya kembali menjadi sorotan.

Informasi tersebut disebut tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat keterangan mengenai penyerahan uang dalam pecahan SGD 1.000.

Center for Energy and Resources Indonesia (CERI) mendesak aparat penegak hukum tidak mengabaikan informasi tersebut dan segera melakukan verifikasi secara menyeluruh.

Sekretaris CERI Hengki Sepriyadi mengatakan,

keterangan dalam BAP harus diuji dengan alat bukti lain sebelum ditarik menjadi kesimpulan mengenai adanya tindak pidana.

"Kalau keterangan dalam BAP tersebut benar dan didukung alat bukti lain, tentu harus ditelusuri secara serius. Yang harus dibuka adalah dari mana uang itu berasal, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, untuk kepentingan apa, dan apakah ada kaitannya dengan proses penanganan perkara ASABRI dan Jiwasraya," kata Hengki, beberapa waktu lalu.

Nama Ferry Yanto Muncul dalam BAP

Dalam dokumen pemeriksaan yang beredar, nama Ferry Yanto Hongkirwang disebut dalam keterangan

seorang saksi.

Keterangan tersebut bermula dari pengakuan saksi yang mengaku berada dalam tekanan menghadapi perkara korupsi ASABRI dan Jiwasraya. Saksi kemudian disebut diperkenalkan oleh Lucy Kwee kepada Ferry Yanto Hongkirwang.

Ferry disebut memiliki kemampuan membantu menyelesaikan persoalan hukum di lingkungan Kejaksaan Agung. Namun, dalam keterangan tersebut, saksi juga menyatakan Ferry tidak pernah secara langsung menyebut nama pejabat tertentu di Kejaksaan Agung yang akan membantu agar dirinya tidak ditetapkan sebagai tersangka.

CERI mengingatkan bah-

wa kemunculan nama seseorang dalam BAP tidak otomatis membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.

"Nama seseorang yang muncul dalam BAP bukan berarti otomatis orang tersebut melakukan tindak pidana. Tetapi apabila ada keterangan mengenai dugaan aliran uang puluhan miliar rupiah, aparat memiliki kewajiban untuk menguji keterangan tersebut dengan alat bukti lainnya," ujar Hengki.

Dugaan Rp40 Miliar dan Sejumlah Nama Pejabat Dokumen yang beredar juga memuat keterangan mengenai uang sekitar Rp40 miliar dalam pecahan SGD 1.000 yang disebut diserahkan kepada pihak yang berkaitan dengan

proses penyidikan di lingkungan Kejaksaan Agung.

Dalam dokumen tersebut, nama Syarief Sulaeman Nahdi disebut sebagai pihak yang menerima uang. Selain itu, terdapat pula penyebutan nama Febri Adriansyah, yang disebut pernah menjabat Direktur Penyidikan/Jampidsus pada periode tersebut, Ali Mukartono yang disebut sebagai Jampidsus, serta Sanitiar Burhanuddin yang menjabat Jaksa Agung pada masa itu.

Namun demikian, CERI menegaskan bahwa penantunan nama-nama tersebut dalam dokumen pemeriksaan bukan bukti otomatis bahwa mereka menerima uang atau terlibat dalam tindak pidana.

● (Agus)



Mahfud MD: Keracunan MBG 50 Ribu Korban “Kecelakaan Berkelanjutan”

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Rentetan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memantik sorotan keras. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bahkan melontarkan pernyataan tajam terkait kejadian yang terus berulang tersebut.

Mahfud menyebut rangkaian kasus keracunan itu sebagai “kecelakaan berkelanjutan”. Ia menilai, jika persoalan terus terjadi dalam skala besar hingga puluhan ribu orang terdampak hanya dalam beberapa bulan, pemerintah harus melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Pernyataan Mahfud itu disampaikan saat menyoroti sistem penyediaan makanan dalam program MBG, termasuk mekanisme pengawasan dan kontrak dengan pihak-pihak yang terlibat.

“Ini kecelakaan yang berkelanjutan, dan kalau berkelanjutan sampai 50.000 hanya dalam beberapa bulan ini, itu artinya kesengajaan. Tahu di situ potensi mencelakakan orang tapi dibiarkan karena terikat kontrak,” kata Mahfud dalam keterangannya, dikutip Rabu (9/9/2026).

Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian. Mahfud mempertanyakan mengapa sistem yang dinilai memiliki potensi membahayakan penerima manfaat masih dapat terus berjalan apabila persoalan serupa berulang.

Mahfud: Jangan Berlindung di Balik Kontrak

Mahfud mendorong pemerintah tidak menjadikan kontrak sebagai alasan untuk mempertahankan kerja sama dengan penyedia yang terbukti bermasalah.

Menurut dia, keselamatan penerima manfaat harus menjadi pertimbangan utama. Apabila ditemukan penyedia makanan yang tidak mampu memenuhi standar keamanan, kontraknya perlu dievaluasi dan, bila diperlukan, dihentikan. ● (Agus)

Usut Korupsi Lahan Hutan Inhutani V Lampung, Kejagung Periksa Eks Direksi dan Komisaris



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua orang saksi dalam perkara dugaan korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT Inhutani V Provinsi Lampung. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Rabu (9/9/2026).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Anang Supriatna menuturkan, dua orang saksi tersebut merupakan Direksi dan Dewan Komisaris PT Inhutani V.

“Telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan dua orang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT Inhutani V Provinsi Lampung,” jelas Anang.

Adapun kedua orang saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya, yaitu AK selaku Dewan Komisaris PT Inhutani V dan ES selaku Direksi PT Inhutani V tahun 2012–2017.

Anang menambahkan, pemeriksaan saksi dilakukan

untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara. Dia menegaskan, penyidikan dijalankan secara profesional, independen, akurat, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

“Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung mengemukakan telah mengambil alih perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan tebu oleh PT PSMI pada areal PT Inhutani V di Provinsi Lampung.

Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengungkapkan kasus tersebut diambil alih dari Kejaksaan Tinggi Lampung.

“Bahwa sampai dengan saat ini, tim penyidik pada Jampidsus telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan, telah melakukan pemeriksaan terhadap 47 orang saksi,” kata Saiful Bahri dalam keterangan pers di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Senin (7/9/2026).

Saiful Bahri menambah-

kan, tim penyidik juga sudah melakukan penyitaan dokumen yang berkaitan dengan dugaan korupsi tersebut.

“Serta telah melakukan permintaan perhitungan kepada ahli,” jelas Saiful.

Saiful menjelaskan, PT PSMI diduga melakukan aktivitas pembukaan lahan perkebunan seluas 1.268 hektare untuk penanaman tebu di kawasan yang beririsan dengan lahan milik Inhutani.

“Peristiwa pidana yang dilakukan PT PSMI melakukan penanaman perkebunan tebu di kawasan PT Inhutani V Lampung tersebut telah melawan hukum,” katanya.

Akibat pembukaan lahan tersebut, Saiful menyebut telah terjadi kerugian negara. Namun, Kejagung belum menetapkan pihak sebagai tersangka dan bertanggung jawab atas perkara itu.

Kejagung masih akan terus melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan saksi, penyitaan aset, serta pengumpulan alat bukti.

Penyidik juga disebut masih mendalami bagian lahan lain yang berada di kawasan hutan dalam perkara tersebut.

“Untuk mengonstruksikan peristiwa pidana yang terjadi dan menemukan pelaku yang bertanggung jawab terkait dengan peristiwa pidana tersebut,” jelas Saiful. ● (Egi)

Lulusan Terbaik Akpol 2001 Kombes Bismo Teguh Resmi Pimpin Reskrimsus Polda Jabar



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memutasi 424 perwira tinggi dan perwira menengah Polri pada akhir Agustus 2026. Turut masuk dalam daftar mutasi jabatan ini yaitu lulusan terbaik Akpol 2001 Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST 18779/VIII/KEP./2026 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri, Bismo yang sebelumnya Analis Kebijakan Madya bidang Pideksus Bareskrim Polri (dalam rangka Dikbangti TA 2026) kini digeser ke wilayah teritorial.

“Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso diangkat dalam jabatan sebagai Dirreskrimsus Polda Jabar,” bunyi salinan Surat Telegram Kapolri, dikutip Kamis (10/9/2026).

Bismo merupakan res-

erse kenyang pengalaman. Berbagai jabatan pernah mampir di pundaknya mulai Kanit Reskrim Polsek Gayungan, Kanit Reskrim Polsek Sawahan 2004, Kanit Reskrim Polsek Wonokromo 2006, dan KBO Reskrim Polresta Surabaya Selatan.

Kariernya terus menanjak hingga menjadi Penyidik Muda Unit III Dit 4 Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri (2010), Kanit Lidik V Krimsus Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara (2011), dan Kanit II Subdit I/Indagdit Reskrimsus Polda Metro Jaya (2012).

Polisi kelahiran Kediri, Jawa Timur ini juga pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Penjarangan (2016), Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan 2017. Kemudian menjadi Kapolres Ciamis 2018, Kapolres Majalengka 2020, sampai Wakapolres Jakarta Barat dan Kapolres Bogor Kota

Tak banyak orang tahu,

dia juga brilian di dunia akademis. Bismo sukses memegang gelar doktor kriminologi di Universitas Indonesia melalui disertasi berjudul “Relasi Politico-Criminal Configurations antara Organized Crime dan Negara sebagai Bentuk State-Organized Crime dalam Fenomena Produksi dan Peredaran Obat Palsu di Indonesia”.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi dan rotasi merupakan bagian dari proses pembinaan organisasi dan karier personel Polri. Penempatan pada jabatan baru dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta kompetensi dan pengalaman yang dimiliki.

“Penempatan pada jabatan baru tentunya telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta tantangan tugas yang dihadapi,” kata Isir. ● (Egi)



Kombes Eko Bagus Riyadi Resmi Pimpin Polresta Bandar Lampung, Herbin Sianipar Geser ke Tangerang

BANDAR LAMPUNG | **Harian Merdeka**

Tongkat komando resmi berpindah tangan. Kombes Pol Eko Bagus Riyadi kini dipercaya menjabat sebagai Kapolresta Bandar Lampung, menggantikan Kombes Pol Herbin Sianipar.

Pergantian tersebut ditandai dengan upacara serah terima jabatan yang dipimpin langsung Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf di ruang kerja Kapolda, Mapolda Lampung, Rabu (9/9/2026).

Eko Bagus Riyadi sebelumnya menjabat sebagai Wakapolres Metro Tangerang Kota. Sementara Herbin Sianipar mendapat amanah baru sebagai Kapolres Metro Tangerang Kota.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun membenarkan pelaksanaan sertijab tersebut. Menurut Yuni, mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan kepolisian merupakan bagian dari dinamika organisasi. Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk penyegaran serta kepercayaan pimpinan kepada personel yang dinilai memiliki rekam kinerja baik.

“Proses serah terima jabatan berlangsung hari ini dan dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung,” ujar Yuni.

Herbin Sianipar Dapat Amanah Baru

Herbin Sianipar yang sebelumnya memimpin Polresta Bandar Lampung kini dipercaya menduduki posisi Kapolres Metro Tangerang Kota. Penempatan tersebut disebut sebagai amanah pada posisi yang lebih strategis. Penilaian terhadap kinerja selama memimpin di Bandar Lampung menjadi salah satu pertimbangan dalam penugasan barunya.

Sementara itu, Eko Bagus Riyadi kini menghadapi tantangan baru sebagai orang nomor satu di Polresta Bandar Lampung.

Dengan pengalaman sebelumnya sebagai Wakapolres Metro Tangerang Kota, Eko diharapkan mampu segera beradaptasi dan meneruskan berbagai program yang telah berjalan. ● (Agus)

Zahwa Massaid Mendaki 8 Kilometer ke Lac de Taney Swiss

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Artis Zahwa Massaid membagikan momen seru saat mendaki menuju Lac de Taney, sebuah danau indah di Swiss. Perjalanan tersebut menjadi pengalaman berkesan bagi Zahwa, meski harus menempuh jalur pendakian yang cukup melelahkan.

Dalam sejumlah foto yang dibagikan melalui media sosial, Zahwa terlihat mengenakan jaket berwarna coklat dan membawa tas berwarna biru. Ia tampak berjalan menyusuri jalur pendakian menuju danau yang berada di kawasan pegunungan Swiss tersebut.

Perjalanan menuju Lac de Taney ternyata cukup menguras tenaga. Zahwa bahkan terlihat ngos-ngosan ketika mendaki.

Berdasarkan informasi yang beredar di internet, perjalanan menuju danau tersebut dari titik awal di Desa Miex dapat ditempuh dengan jarak kurang lebih 8 kilometer.

Setelah melewati jalur pendakian, Zahwa akhirnya berhasil mencapai Lac de Taney. Ia kemudian berpose dengan latar belakang danau yang dikelilingi pemandangan alam pegunungan.

Rasa lega sekaligus kagum terlihat dari unggahan Zahwa.

"Mashaallah," tulisnya dalam unggahan yang terlihat pada Kamis (10/9/2026).

Tak hanya menikmati pemandangan, Zahwa juga menyempatkan diri berenang di Lac de Taney. Air danau yang tampak jernih membuat momen tersebut semakin menarik.

Aktivitas itu menjadi salah satu pengalaman Zahwa menikmati keindahan alam Swiss sekaligus melepas penat dengan melakukan kegiatan di alam terbuka.

● (hmi)



TNI Temukan 21.400 Batang Ganja di Yahukimo, Diduga Terkait Kelompok Egianus Kogoya

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Satgas Pamantas RI-PNG Mobile Yonif 725 yang berada di bawah kendali Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III menemukan ladang ganja di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Dari lokasi tersebut, aparat menyebut sedikitnya 21.400 batang tanaman ganja ditemukan dalam kondisi siap panen dan diduga siap diedarkan.

Ladang ganja itu berada di kawasan Ibiroma Kompleks, Distrik Kurima. TNI menduga lokasi tersebut berkaitan dengan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang dipimpin Egianus Kogoya.

Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto mengatakan, penemuan tersebut menjadi indikasi adanya aktivitas budidaya ganja yang diduga digunakan untuk mendukung operasional kelompok bersenjata di Papua.

Menurut Lucky, hasil penjualan ganja tersebut diduga menjadi salah satu sumber pendanaan untuk kegiatan kelompok tersebut.

"Penemuan ladang ganja ini merupakan bukti nyata keseriusan kelompok separatis tersebut untuk membudidayakan ganja yang hasil penjualannya digunakan untuk operasional," ujar Lucky, berdasarkan keterangan yang disampaikan TNI.

Ladang Puluhan Ribu Pohon Hamparan tanaman ganja ditemukan dalam jumlah besar di lokasi yang disebut berada di kawasan Ibiroma Kompleks. TNI menyatakan kondisi lokasi tersebut memiliki kemiripan dengan latar belakang sejumlah dokumentasi yang sebelumnya dikaitkan dengan keberadaan Egianus Kogoya.

Namun, dugaan kepemilikan maupun keterkaitan langsung



Egianus Kogoya dengan ladang tersebut masih merupakan klaim aparat dan memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui proses hukum.

Lucky juga menyebut adanya dugaan hubungan antara Egianus Kogoya dengan Panglima TPNPB Kodap XII Lanny Jaya, Purom Okiman Wenda. Menurutnya, kelompok tersebut juga diduga memiliki aktivitas serupa yang berkaitan dengan pendanaan aksi kekerasan di Papua.

21.400 Batang Ganja Akan Diserahkan ke Polisi

TNI menyatakan seluruh barang bukti tanaman ganja yang ditemukan akan diserahkan kepada Polres setempat untuk diproses sesuai ketentuan hukum dan selanjutnya dimusnahkan.

Penemuan tersebut sekaligus menjadi perhatian aparat karena jumlah tanaman yang diamankan tergolong besar.

Letjen TNI Lucky Avianto menilai keberadaan ladang ganja tersebut bukan hanya berkaitan dengan persoalan tindak pidana narkoba, tetapi juga berpotensi memberikan dampak terhadap masyarakat, khususnya generasi muda di Papua.

Ia menyebut 21.400 batang tanaman ganja yang ditemukan merupakan indikasi adanya upaya yang dinilai dapat merusak masa depan generasi muda Papua.

Prajurit Satgas Mendapat Penghargaan

Atas keberhasilan menemukan lokasi ladang ganja tersebut, Letjen TNI Lucky Avianto memberikan penghargaan kepada prajurit Satgas Pamantas RI-PNG Mobile Yonif 725.

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras personel dalam mengungkap keberadaan ladang ganja di wilayah Distrik Kurima.

TNI selanjutnya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat untuk memastikan seluruh barang bukti diproses sesuai prosedur.

Penemuan ini menjadi bagian dari upaya aparat menekan peredaran narkoba sekaligus mengungkap dugaan sumber pendanaan kelompok bersenjata di wilayah Papua Pegunungan.

Perjelas status hukum semua pihak

Ringkas pengulangan klaim aparat

Pisahkan fakta, dugaan, dan penilaian. ● (Agus)



Sekjen Forum Pimred Multimedia Desak Pencarian Maksimal

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Keberadaan lima wartawan foto yang dilaporkan hilang saat melakukan peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau hingga Rabu (9/9/2026) masih belum diketahui.

Forum Pimred Multimedia Indonesia mendesak aparat kepolisian dan Tim SAR gabungan untuk mengoptimalkan upaya pencarian.

Sekretaris Jenderal Forum Pimred Multimedia Indonesia, Helmy Halim, meminta seluruh pihak terkait bergerak cepat untuk menemukan lima jurnalis tersebut.

"Kami meminta pihak aparat segera bertindak cepat dan melakukan upaya maksimal untuk menemukan lima jurnalis tersebut," ujar Helmy Halim usai acara Ngobrol Santai Forum Pimred Multimedia Indonesia bersama Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Hotel Luminor, Pecenongan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).

Helmy mengatakan, atas nama keluarga besar Forum Pimred Multimedia Indonesia, pihaknya menyampaikan keprihatinan mendalam dan terus mendoakan keselamatan lima wartawan yang hingga kini masih dalam pencarian.

"Kami berharap dan berdoa semoga kelima rekan jurnalis tersebut segera ditemukan dalam keadaan selamat. Kami juga menyampaikan keprihatinan kepada keluarga yang saat ini menunggu kabar dari tim pencarian," katanya.

Dalam dialog bersama para pemimpin redaksi dan pengurus Forum Pimred Multimedia Indonesia, Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, Polri terus memantau perkembangan proses pencarian lima wartawan yang dilaporkan hilang bersama tiga orang lainnya.

"Secara berkala, kami mendapat laporan dari Kapolda Banten mengenai perkembangan pencarian wartawan dan tiga orang lainnya yang masih hilang," ujar Johnny Eddizon.

Ia mengajak keluarga besar pers dan masyarakat untuk turut memberikan dukungan terhadap upaya pencarian yang dilakukan tim gabungan. ● (Alan)

Dugaan Mafia BBM di Proyek SMAN Sukma Nias, Solar Subsidi Diduga Dikawal Oknum Aparat

GUNUNGSITOLI |
Harian Merdeka

Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) mencuat dalam proyek Revitalisasi SMAN Unggulan Sukma Nias, Sumatera Utara. Solar subsidi diduga dikumpulkan dari sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), ditampung di sebuah gudang, lalu dikirim ke lokasi proyek yang dikerjakan PT Razasa Karya.

Proyek senilai Rp87,3 miliar lebih itu bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara 2026 me-

lalui Dinas Pendidikan. Dugaan penyimpangan mencuat dari sejumlah dokumen pembelian BBM yang diperoleh wartawan.

Salah satu nota mencatat pembelian 5.000 liter BBM pada 15 Juli 2026 senilai Rp70 juta atau sekitar Rp14 ribu per liter.

Adapun dokumen lain bertanggal 6 Juni 2026 yang diduga diterbitkan PT Razasa Karya mencantumkan pembelian 5.000 liter BBM senilai Rp160.117.500, termasuk PPN 11 persen. Nilainya setara sekitar Rp28.858 per liter.

Dalam dokumen tersebut, BBM disebut sebagai solar in-



dustri B40. Namun, seorang sumber yang pernah memasok BBM ke proyek itu menduga bahan bakar yang digunakan berasal dari solar subsidi yang dikumpulkan dari sejumlah SPBU di Kepulauan Nias.

Solar tersebut kemudian diduga dicatat dalam administrasi

proyek sebagai BBM nonsubsidi.

Menurut sumber itu, pengumpulan BBM berlangsung secara terorganisasi. Solar dikumpulkan hingga sekitar 5.000 liter sebelum dibawa ke sebuah gudang di kawasan Jalan Yos Sudarso, Gunungsitoli, yang disebut berkaitan dengan pengusaha minyak berinisial FH.

"Solar dikumpulkan dari beberapa SPBU. Setelah sekitar 5.000 liter, dibawa ke gudang. Dalam prosesnya ada oknum aparat yang mengawal," ujar sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. ● (Adi)

JAKARTA |
Harian Merdeka

Kantor Hukum 2000 mengapresiasi langkah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) yang menetapkan tiga anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana terhadap tubuh.

Ketiga anggota DPRD TTU tersebut yakni Therensius Lazakar dari Partai Golkar, Nubertus Tubani dari PKB, dan Veronika Lake dari PDI Perjuangan. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan pada 24 Agustus 2026.

Kantor Hukum 2000 menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penganiayaan dan/atau pengancaman menggunakan kekerasan verbal yang diduga menyebabkan korban mengalami gangguan kesehatan berupa depresi berat hingga meninggal dunia karena bunuh diri.

Direktur Kantor Hukum 2000, Benny Hutabarat, S.H., mengatakan pihaknya mengapresiasi proses hukum yang telah dilakukan Polda NTT dan meminta penyidik tidak ragu mengambil langkah penahanan apabila telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana.

"Kami mengapresiasi langkah Polda NTT yang telah mene-

Kantor Hukum 2000 Minta Polda NTT Tahan Tiga Tersangka Anggota DPRD TTU

tapkan ketiga anggota DPRD Kabupaten TTU sebagai tersangka. Kami berharap penyidik tidak ragu untuk melakukan penahanan apabila seluruh persyaratan objektif dan subjektif berdasarkan hukum telah terpenuhi," ujar Benny kepada awak media, Selasa (8/9/2026)

Menurut Benny, status dan posisi ketiga tersangka sebagai anggota DPRD perlu menjadi perhatian dalam proses penegakan hukum. Namun, ia menegaskan bahwa tindakan penahanan harus tetap dilakukan berdasarkan alasan dan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana.

Kantor Hukum 2000 menilai potensi seseorang melarikan diri,

menghilangkan atau merusak alat bukti, maupun mengulangi tindak pidana merupakan hal yang harus dipertimbangkan secara serius oleh penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jabatan atau kekuasaan yang dimiliki seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat proses penegakan hukum. Namun demikian, setiap tindakan penyidik juga harus tetap berdasarkan hukum dan alat bukti yang cukup," kata Benny.

Dorong Pengawasan terhadap Pejabat Publik

Selain mengawal proses hukum terhadap ketiga tersangka, Kantor

Hukum 2000 menyatakan akan melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait.

Langkah tersebut, menurut Benny, termasuk mempertimbangkan penyampaian pengaduan terkait aspek etik dan disiplin kepada partai politik yang mengusung atau merekomendasikan ketiga tersangka sebagai anggota DPRD Kabupaten TTU. "Dalam kesempatan ini, Kantor Hukum 2000 juga akan melakukan koordinasi kepada instansi terkait, termasuk melakukan pengaduan etik dan disiplin kepada partai politik yang merekomendasikan ketiga tersangka tersebut sebagai anggota DPRD Kabupaten TTU," ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut bukan semata-mata ditujukan untuk memberikan tekanan terhadap proses hukum, melainkan sebagai bagian dari upaya mendorong akuntabilitas pejabat publik.

Kantor Hukum 2000 juga menyatakan bahwa proses hukum harus memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban serta menjadi momentum untuk mencegah terulangnya dugaan tindakan arogansi oleh pejabat publik di kemudian hari. ● (Egi)



SOAL KOPDES.....

yang akan memperkuat tata kelola serta peran koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Satgas tersebut nantinya diarahkan untuk mengoptimalkan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam sistem logistik nasional, termasuk mendukung penyaluran berbagai barang subsidi kepada masyarakat.

Pembentukan Satgas disepakati dalam pertemuan tertutup antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi,

serta Kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Langkah ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk membangun sinergi lintas kementerian dan lembaga agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya menjadi wadah ekonomi masyarakat, tetapi juga memiliki peran strategis dalam rantai pasok nasional.

Dengan dukungan Satgas, KDKMP diharapkan mampu

menjadi salah satu simpul distribusi barang dan kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Optimalisasi tersebut juga dinilai penting untuk memastikan penyaluran barang subsidi berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.

Pemerintah kini dituntut memastikan pembentukan Satgas tidak berhenti pada koordinasi antarinstansi.

Penguatan kelembagaan, ke-

siapan sumber daya manusia, sistem distribusi, hingga pengawasan harus menjadi bagian penting agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jika berjalan optimal, KDKMP berpotensi menjadi bagian penting dari ekosistem logistik nasional sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput.

Perjelas Tugas Utama Satgas.

● (Agus)

SAYEMBARA.....

Persoalan tersebut justru hendak ditempatkan dalam konteks sengketa pemilu, khususnya terkait persyaratan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Bukan Pemakzulan, Tapi Dibawa ke MK.

Denny melihat persoalan ini memiliki konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar perdebatan mengenai selebar ijazah.

Menurut argumentasi yang disampaikan, apabila terdapat bukti yang dapat menunjukkan persoalan terkait persyaratan pencalonan, maka hal tersebut dapat diuji melalui jalur hukum pemilu.

Karena itu, Denny tidak memilih jalan pemakzulan.

Langkah tersebut menjadi perhatian karena MK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Namun, pengajuan perkara tentu harus memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa, kedudukan hukum pemohon, tenggat waktu,

serta hukum acara yang berlaku.

Artinya, rencana Denny belum otomatis berarti MK akan menerima dan memeriksa perkara tersebut.

Sayembara Jadi Pemantik

Sebelumnya, Denny membuka sayembara berkaitan dengan keberadaan dan pembuktian dokumen pendidikan Gibran.

Sayembara itu kemudian menjadi sorotan karena menyentuh salah satu isu sensitif dalam perjalanan politik nasional: syarat pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Denny berusaha mengumpulkan bukti yang menurutnya dapat digunakan untuk memperkuat langkah hukum.

Setelah sayembara berakhir, perhatian kini bergeser pada pertanyaan berikutnya:

Apakah bukti yang dikumpulkan Denny akan benar-benar dibawa ke MK?

Dan yang lebih penting, apakah MK memiliki ruang untuk

memeriksa persoalan tersebut setelah seluruh tahapan Pilpres 2024 selesai?

Bisa Jadi Babak Baru Pilpres 2024

Jika langkah tersebut benar-benar diwujudkan, polemik ini berpotensi membuka kembali perdebatan mengenai proses pencalonan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Padahal, hasil Pilpres 2024 sebelumnya telah melalui proses hukum di MK.

Karena itu, langkah Denny akan menghadapi tantangan hukum yang tidak sederhana. Selain harus membuktikan dalil yang diajukan, terdapat pula persoalan mengenai kewenangan MK dan apakah perkara yang diajukan sesuai dengan objek sengketa yang dapat diperiksa lembaga tersebut.

Di sinilah pertarungan berikutnya bisa terjadi.

Bukan lagi sekadar perang

pernyataan di ruang publik, melainkan adu bukti dan argumentasi hukum di hadapan lembaga konstitusi.

Denny Tunggu Bukti

Denny sendiri belum mengajukan tuduhan mengenai dokumen pendidikan Gibran sebagai fakta hukum yang telah diputus pengadilan.

Bukti yang dikumpulkan melalui sayembara akan menjadi bagian penting apabila benar-benar digunakan dalam proses hukum.

Sebab, tanpa bukti yang kuat dan relevan, isu tersebut berisiko kembali menjadi perdebatan politik semata. Sebaliknya, apabila Denny mampu menghadirkan bukti yang menurut hukum relevan dengan persyaratan pencalonan, perkara tersebut berpotensi menimbulkan perdebatan konstitusional baru.

Kini bola berada di tangan Denny.

Sayembara telah berakhir.

● (Agus)

KPK USUT.....

Barapratama, PT Sinar Kumala Naga dan PT Bara Kumala Sakti.

"Pendalaman terhadap AA ini berkaitan dengan jasa pengamanan, ya," kata Budi kepada wartawan yang dikutip Rabu, 9 September.

"Dimana dalam produksi batu bara itu kan di dieksplorasi di site ya, yang kemudian dibawa ke dermaga untuk bisa didistribusikan atau diangkut ke wilayah lainnya," sambung dia.

Tak hanya itu, Ahmad Ali juga dicecar soal aliran uang dalam kasus tersebut.

"Ke mana saja, siapa saja, tujuannya untuk apa, nah, itu semuanya dialami termasuk kepada saudara AA," tegas Budi.

Ke depan, Budi memastikan penyidik berpeluang kembali memeriksa Ahmad Ali sebagai saksi. Adapun politikus ini sudah pernah diperiksa penyidik pada 2025 lalu di Polresta Banyumas,

Jawa Tengah.

"Ya, untuk pemeriksaan saksi siapapun tentunya berdasarkan kebutuhan dalam proses penyidikan," ujar dia. Diberitakan sebelumnya, KPK terus mengusut dugaan korupsi terkait ekspor batu bara yang menjerat Rita Widayarsi selaku eks Bupati Kutai Kartanegara. Bahkan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terus ditelisik.

Diduga ada penerimaan uang metrik ton yang dilakukan Rita

dalam setiap proses eksplorasi tambang batu bara. Pengusutan ini dilakukan KPK sebagai pintu masuk mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan tiga perusahaan korporasi yakni PT Alamjaya Barapratama, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Bara. Perusahaan batu bara ini diduga menjadi sarana penerimaan uang korupsi.

● (Egi)

YAMAL LUAR BIASA

BARCELONA |
Harian Merdeka

Lamine Yamal bersinar saat Barcelona menggulung Feyenoord di Liga Champions. Penampilan istimewanya dipuji pelatih Hansi Flick.

Barcelona menjamu Feyenoord di Camp Nou, Rabu (9/9/2026). Tuan rumah menang 5-1 atas wakil Eredivisie.

Gol-gol Barcelona didapat lewat brace Raphinha, dan satu gol masing-masing dari Karim Adeyemi, Yamal, dan Gabriel

Jesus. Sementara satu gol tim tamu dicetak Sem Steijn.

Selain Raphinha, yang keluar jadi Man of the Match, Yamal juga menjadi bintang di laga itu.

Winger berusia 19 tahun itu juga bikin dua assist untuk rekan-

rekannya.

Pergerakannya di sisi kanan mengacak-acak pertahanan Feyenoord. Tak cuma mematikan, Lamine Yamal juga menghibur lewat penampilan atraktifnya menggocek lawan.

Sofascore memberinya rating sempurna di laga tersebut. Yamal membuat 4 tembakan, bikin 7 dribble sukses, bahkan juga membantu pertahanan dengan bikin 3 tekel berhasil.

Penampilan Yamal itu lantas dikaitkan dengan peluangnya memenangkan Ballon d'Or 2026, yang akan diumumkan bulan depan. Pelatih Hansi Flick tak ragu mendukungnya.

"Tentu saja, dia pemain saya, seorang pemain dari Barcelona. Dia pantas memenangkan Ballon

d'Or. Bagi saya, itu luar biasa," kata Flick, melansir ESPN.

"Anda bisa melihat dalam setiap pertandingan bahwa dia istimewa. Tidak ada yang seperti dia. Saya pikir dia pantas mendapatkannya," jelas pelatih asal Jerman itu.

Lamine Yamal masuk dalam 30 kandidat peraih Ballon d'Or 2026. Peluangnya terbuka lebar sebab ia juga baru membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu, selain membantu Barcelona merebut gelar LaLiga dan Piala Super Spanyol. ● (dts)



terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

HARIAN MERDEKA
aspirasi rakyat

Langganan ePaper...

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.

Hanya **Rp30.000/bulan** Hubungin **Alan Oskar : +62 895-2285-1963**